



PUTUSKAN RANTAI KORUPSI

DI SAJIKAN PADA PELATIHAN DASAR CALON PNS GOL III

PUSDIKLAT BADAN PUSAT STATISTIK

BIODATA

- Nama : **Daud Eliezar**
- Riwayat Pekerjaan : - BPS Provinsi Kalimantan Tengah (1996 – 2001)
- Pusdiklat BPS (2002 – sekarang)
- Riwayat Pendidikan : - Akademi Ilmu Statistik (1996)
- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (2000)
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2010)
- Nomor HP : **081213748545**
- Alamat e-mail : **desinaga@bps.go.id**



Tujuan Pembelajaran

Deskripsi Singkat

Mata diklat ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta diklat prajabatan, disajikan berbasiskan Experiential learning ;

dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui multi metode dan media ceramah interaktif, diskusi menonton film, studi kasus simulasi dan demonstrasi.

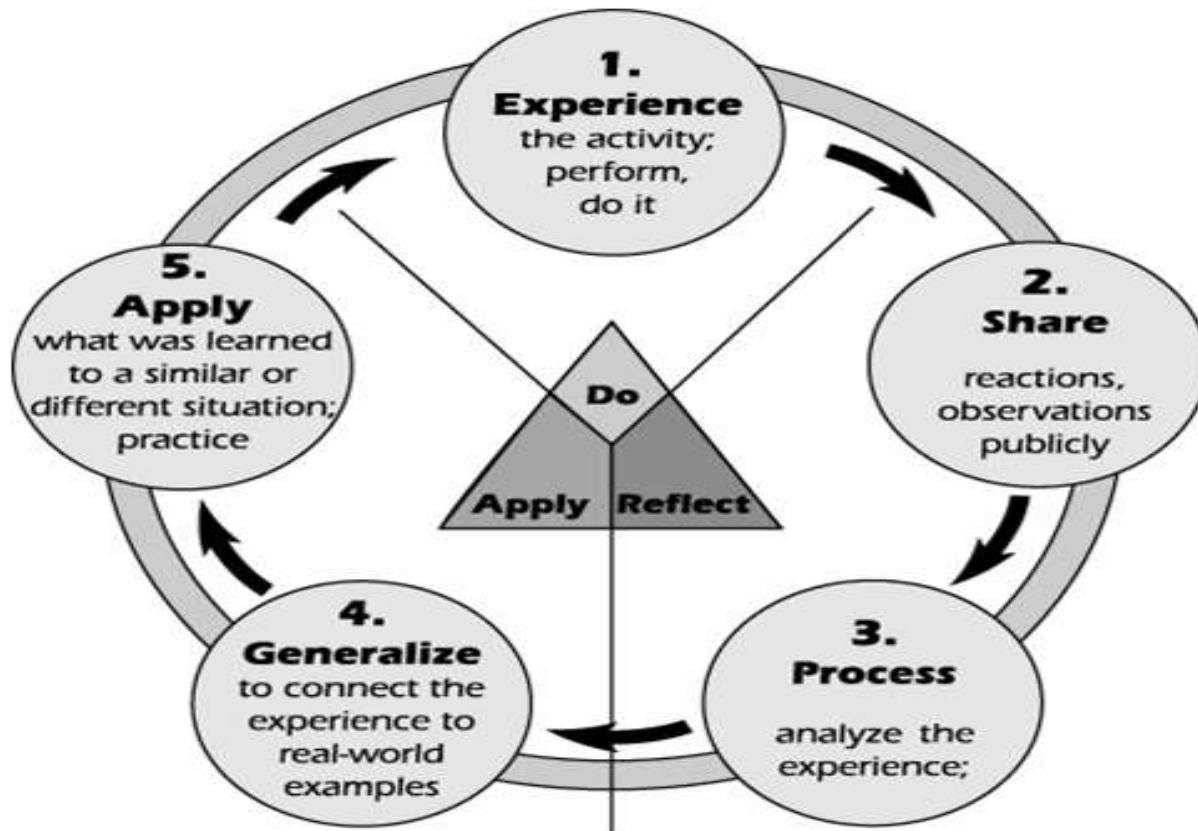
Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam memimpin, mengelola jabatannya.

Change Policy

*(Kebijakan
Rembahan)*

*Diklat
Prajabatan*

Metode EXPERIENTIAL LEARNING



- Metode yang digunakan adalah experiential learning model, seperti konsep model Kolb (1984) dan Kurt Lewin, yang memiliki konsep model deskriptif untuk proses pembelajaran orang dewasa.

Materi POKOK dan Sub Materi POKOK

Modul I

A. Sadar Anti Korupsi

- Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi
- Pengertian Korupsi
- Tindak pidana Korupsi
- Niat, Semangat, Komitmen Anti Korupsi
- Indonesia Bebas Korupsi

Modul II

B. Semakin Jauh Dari Korupsi

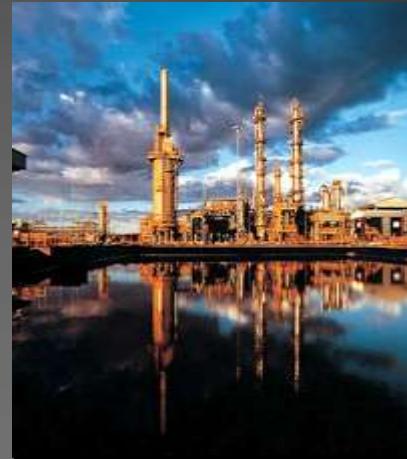
- Tunas Integritas
- Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi
- Penyelarasan Nilai Organisasi dan Anti Korupsi
- Penanaman Nilai Integritas
- Bangun Sistem Integritas



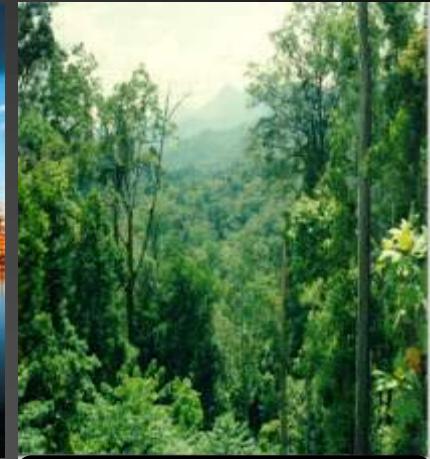
Indonesia bumi
ciptaan Tuhan dengan keindahan dan kekayaan
yang luar biasa



Pantai Terindah



Gas alam kualitas terbaik



Hutan terbaik



Tambang Emas Terbesar



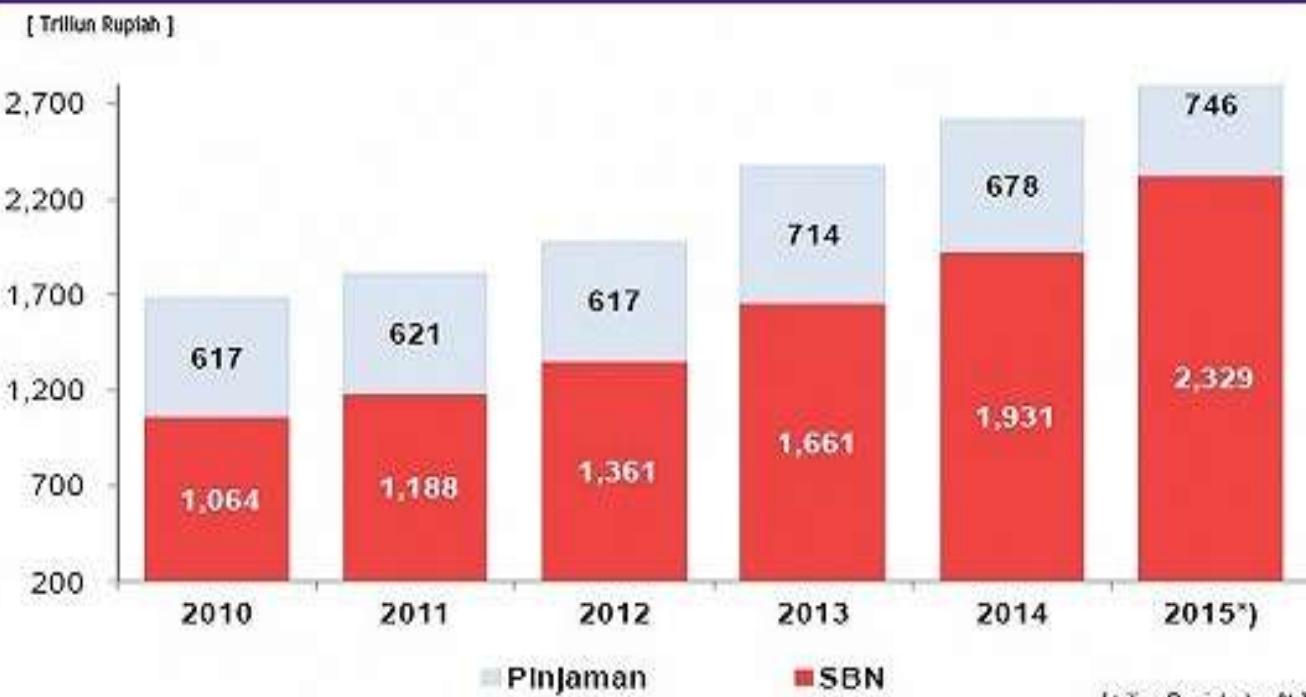
Batu Bara Terbaik



Tanah yang Subur

Utang Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Pusat, 2010-2015 (Grafik)



Utang Pemerintah RI Rp 3.021 triliun

Dalam 10 bulan, atau Januari Oktober 2015, jumlah utang pemerintah Indonesia tercatat naik Rp 412,52 triliun, menjadi Rp 3.021,3 triliun. Berikut ini data dan perbandingan utang pemerintah dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jumat (20/11/2015).

TOTAL UTANG PEMERINTAH:

2010
Rp 1.681 T

2011
Rp 1.808,95 T

2012
Rp 1.977,95 T

2013
Rp 2.375,5 T

2014
Rp 2.608,78 T

Okt 2015
Rp 3.021,3 T

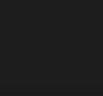
HINGGA OKTOBER 2015, UTANG TERDIRI ATAS:



Pinjaman
Rp 729,51 T ▲ dari Rp 677,56 T di 2014



Pinjaman Luar Negeri
Rp 725,64 T ▲ dari Rp 674,33 T di 2014



Pinjaman Dalam Negeri
Rp 3,68 T ▲ dari Rp 3,22 T di 2014



Surat Berharga/Surat Utang
Rp 2.291,75 T ▲ dari Rp 1.931,22 T di 2014



Dalam mata uang dolar AS, total utang pemerintah pusat hingga Oktober 2015 mencapai:
Rp US\$ 221,52 M ▲ dari US\$ 209,71 M di 2014

Berita Utang Indonesia

Rabu 21 Sep 2016, 06:55 WIB

Utang Pemerintah RI Rp 3.438 T, Naik Rp 78 T Dalam Sebulan

Wahyu Daniel - detikFinance



Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Hingga akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.438,29 triliun. Naik Rp 78,47 triliun dibandingkan akhir Juli 2016, yaitu Rp 3.359,82 triliun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir Agustus 2016 adalah US\$ 258,52 miliar, naik dari posisi akhir Juli 2016 yang sebesar US\$ 256,59 miliar.

Berita Utang Indonesia

Selasa 22 Nov 2016, 06:33 WIB

Turun Tipis, Utang Pemerintah RI Kini Rp 3.439,78 T

Wahyu Daniel - detikFinance



Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Hingga akhir Oktober 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.439,78 triliun. Turun tipis Rp 5 triliun dibandingkan akhir September 2016, yaitu Rp 3.444,82 triliun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir Oktober 2016 adalah US\$ 263,56 miliar, turun dari posisi akhir September 2016 yang sebesar US\$ 265,03 miliar.



Perkembangan Angka Kemiskinan Indonesia

(Juta orang*)



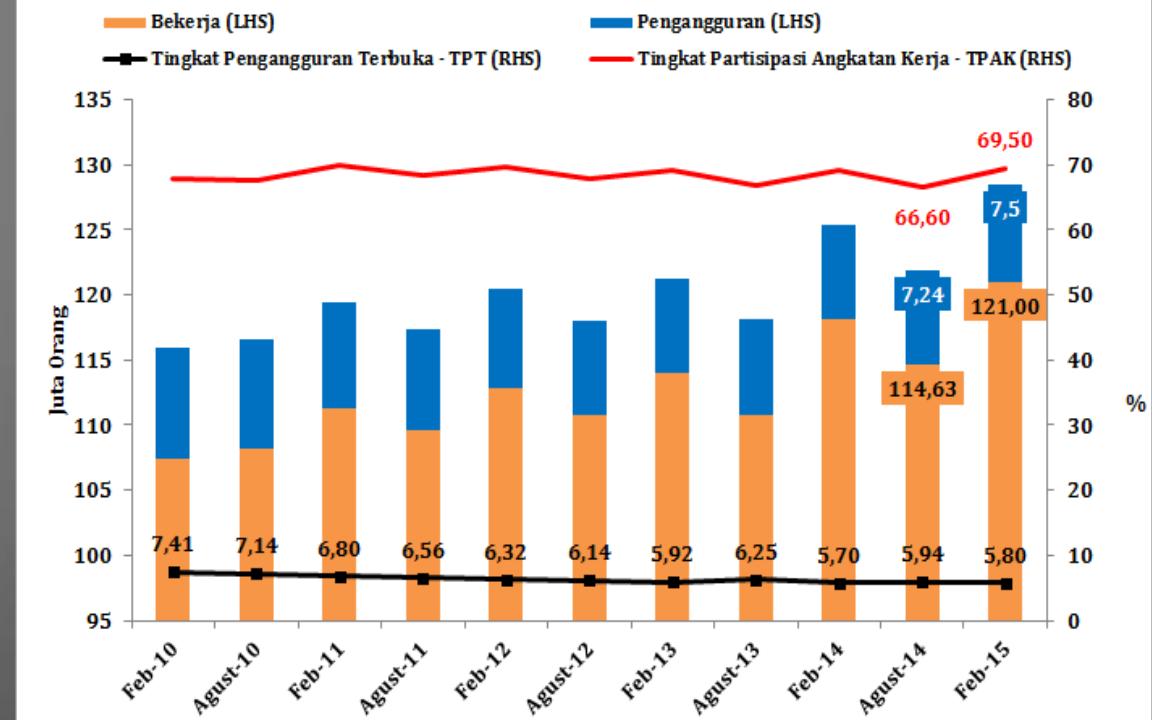
Daerah dengan Angka Kemiskinan Tertinggi Maret 2013

● Papua	31,13%
● Papua Barat	26,67%
● Maluku	20,33%
● Nusa Tenggara Timur	20,03%
● Bengkulu	18,34%
● Nusa Tenggara Barat	17,97%
● Aceh	17,6%
● Gorontalo	17,51%

Sumber: BPS/Ghp



Jumlah Penduduk Miskin & Pengangguran (dalam juta jiwa)



Sudah makmurkah rakyat Indonesia?





Mengapa kekayaan yang dimiliki negara
Indonesia belum bisa membuat rakyat
Indonesia makmur?



Kajian Dampak Perilaku Korupsi

Kajian

1.	Negara Korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar (Depken and Lafountan, 2006)
2.	Harga Infrastruktur lebih tinggi (Golden and Picci, 2005)
3.	Tingkat Korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davoodi and Alonso-Terme, 2002)
4.	Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995)
5.	Persepsi Korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB)
6.	Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB)

Kerusakan hutan dan lingkungannya

Bangunan yang cepat rusak

Penegakkan Hukum yang tidak adil

Pelayanan Publik yang buruk

Peredaran Narkoba

Sumber Daya Alam melimpah Rakyat tetap sengsara, dll. Fenomena yang terjadi

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016

Perceived levels of public sector corruption in 176 economies



Top economies perceived as "Very Clean"

Rank	Score
1	Denmark 90
1	New Zealand 90
3	Finland 89
4	Sweden 88
5	Switzerland 86

Top economies perceived as "Highly Corrupt"

Rank	Score
176	Somalia 10
175	South Sudan 11
174	North Korea 12
173	Syria 13
170*	Yemen 14

* Also ranked 170th are Sudan and Libya

HOW SELECT ASIA-PACIFIC ECONOMIES ARE PERCEIVED

Rank	2012	2013	Score 2014	2015	2016
7	Singapore 87	86	84	85	84
41	Brunei 55	60	N/A	N/A	58
55	Malaysia 49	50	52	50	49
79	China 39	40	36	37	40
79	India 36	36	38	38	40

Tabel 1
Peringkat dan Skor Corruption Perception Index 2015

	Peringkat Regional	Peringkat Global	Negara	Skor
	2	8	Singapore (Ranking Turun, Skor Turun)	85
	9	54	Malaysia (Ranking Turun, Skor Turun)	50
	11	76	Thailand (Ranking Turun, Skor Tetap)	38
	15	88	Indonesia (Ranking Naik, Skor Naik)	36
	16	95	Philippines (Ranking Turun, Skor Turun)	35
	17	112	Vietnam (Ranking Naik, Skor Tetap)	31
	24	147	Myanmar (Ranking Turun, Skor Naik)	22

Sumber: Corruption Perception Index 2015



INDONESIA

2014 Score 34 Rank 107 / 175

2013 Score 32 2012 Score 32



detiment of democracy and democratic institutions is yet to be seen in 2017.

— Corruption Perceptions Index 2016

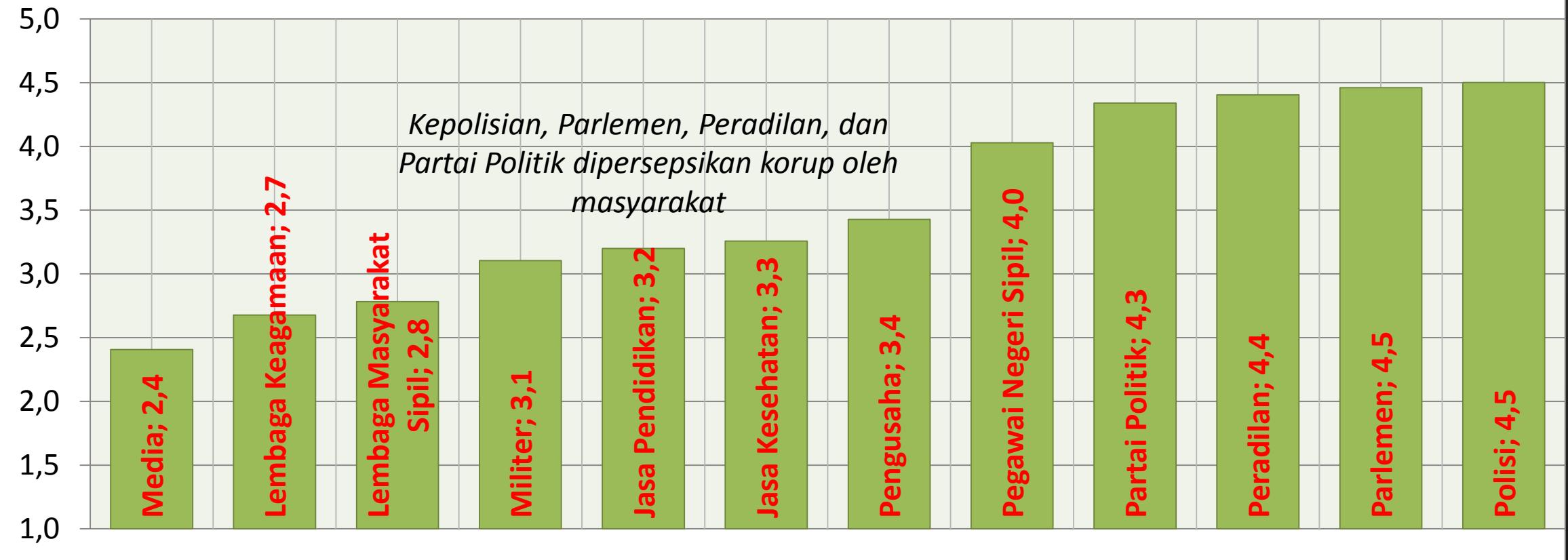
perceptions of corruption within the past two years.

Rank	2012	2013	Score 2014	2015	2016
90	Indonesia 32	32	34	36	37
101	Philippines 34	36	38	35	35
101	Thailand 37	35	38	38	35
101	Timor-Leste 33	30	28	28	35
113	Vietnam 31	31	31	31	33

Rank	2012	2013	Score 2014	2015	2016
123	Laos 21	26	25	25	30
136	Myanmar 15	21	21	22	28
156	Cambodia 22	20	21	21	21

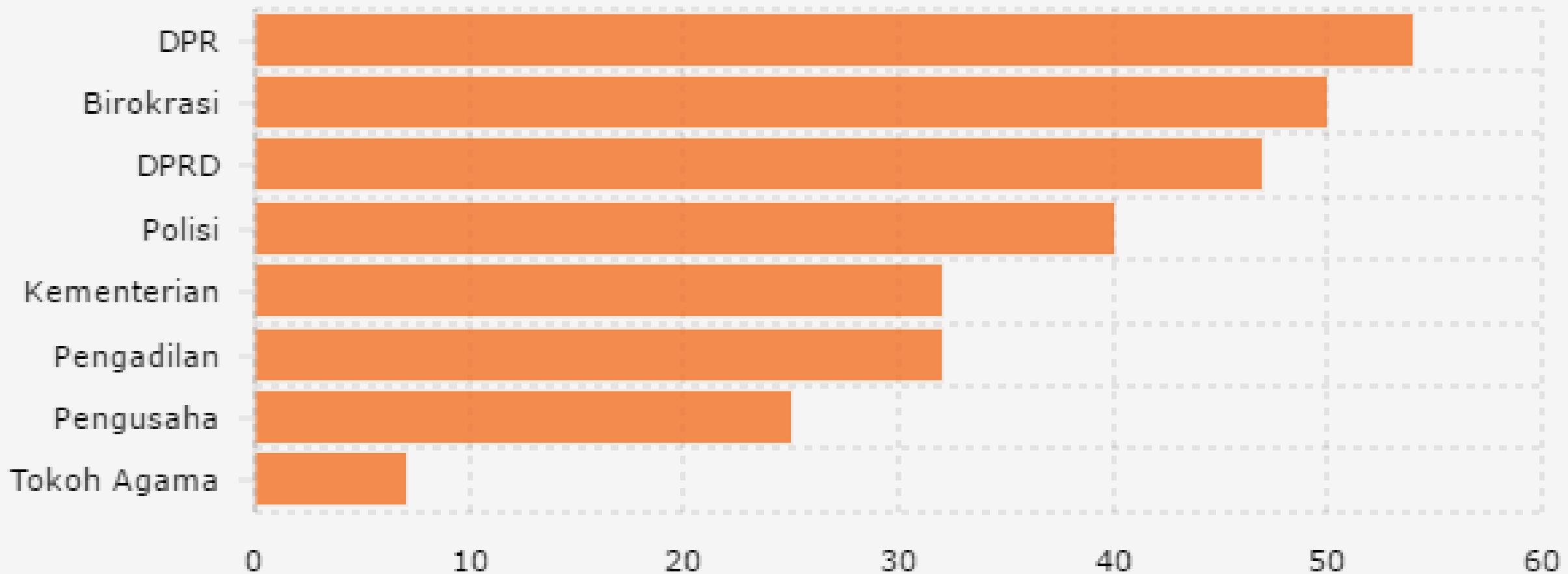
SOURCE: TRANSPARENCY INTERNATIONAL
BUSINESSWORLD GRAPHICS: BONG R. FORTIN

Problem korupsi Indonesia: korupsi birokrasi dan politik

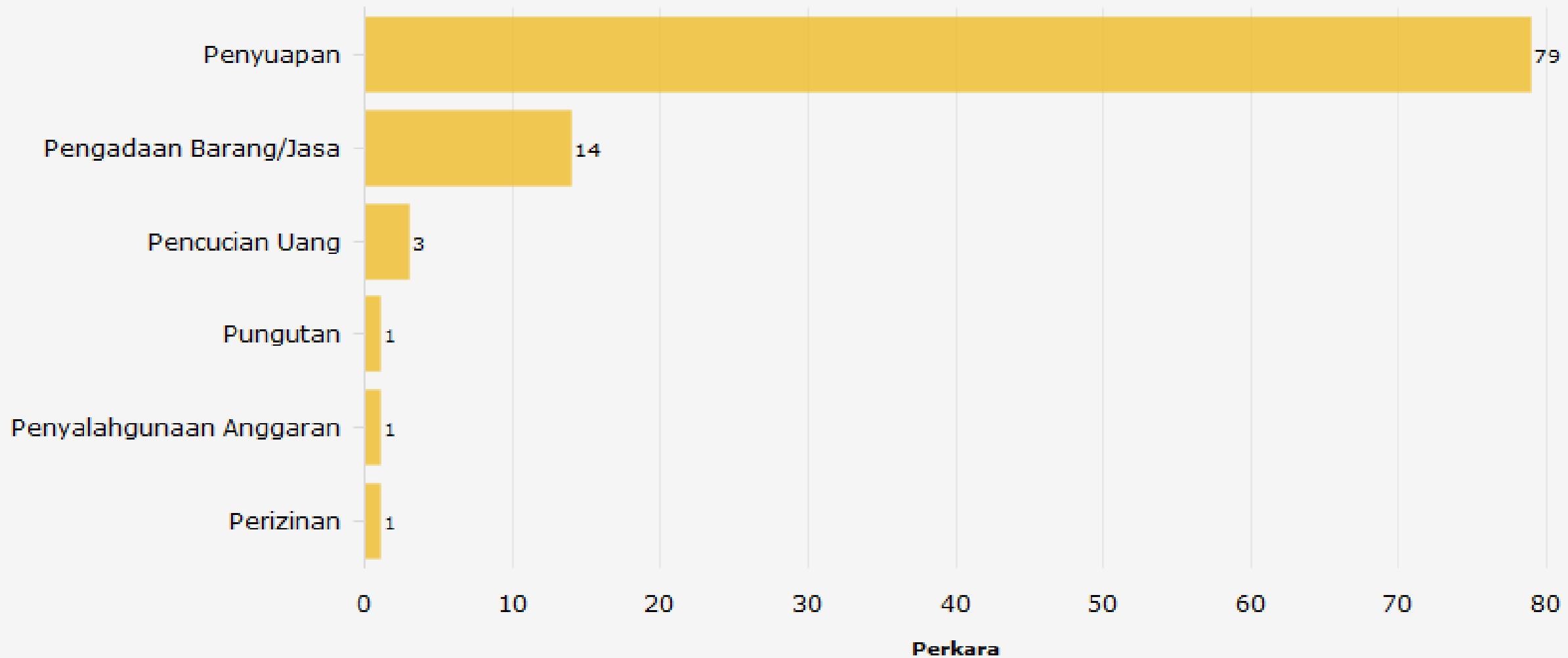


Sumber: Global Corruption Barometer (2013)

Survei Persepsi Lembaga Paling Korup oleh Transparency International pada 2017



Jumlah Perkara Korupsi yang Ditangani KPK pada 2016 Berdasarkan Modus



INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2015 MENURUN

Untuk kali keempat, BPS merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi 2015 di Gedung 3 lantai 1 BPS (22/2). Dalam survei yang melibatkan sampel 10.000 rumah tangga di 34 provinsi dan 170 kabupaten/kota di Indonesia pada November 2015 ini menghasilkan indeks sebesar 3,59 atau lebih rendah 0,02 poin dibandingkan dengan IPAK 2014 sebesar 3,61. "Nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi," jelas Suryamin, Kepala BPS.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Statistik Sosial, M.Sairi; Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan; Direktur Analisa Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadiawati; dan *Country Manager* United Nation Office on Drugs and Crime, Collie Brown. Sementara Ketua KPK, Agus Rahardjo yang awalnya dijadwalkan hadir, batal datang karena adanya pembahasan amandemen UU KPK di hari yang sama.

Lebih lanjut, Suryamin mengatakan IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni persepsi dan pengalaman. Indeks persepsi cenderung meningkat sejak 2013 ke 2015, sebaliknya indeks pengalaman cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan masyarakat semakin idealis "membenci korupsi", tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap dua dimensi ini Pahala menanggapi, "KPK tidak terlalu mempersalahkan terjadinya penurunan dalam IPAK 2015. Justru survei ini sangat



Deputi Bidang Statistik Sosial (kanan) berbincang dengan Deputi Pencegahan KPK (kedua dari kiri) Pahala Nainggolan

bermanfaat karena dilakukan secara kuantitatif dan berdasarkan fakta di lapangan. Dari dimensi persepsi saya pikir teman-teman media sudah cukup berhasil menginfokan ke masyarakat dalam membentuk pengetahuan anti korupsi. Akan tetapi tidak demikian faktanya di lapangan. Masih banyak praktik korupsi ditemui di pelayanan publik. Oleh karenanya survei ini sangat membantu KPK untuk mendukung diwujudkannya pelayanan terpadu satu pintu," tutur Pahala di akhir konferensi pers.

■ V2



Korupsi bagaikan BOM waktu yang dapat meledak kapan saja dan menghancurkan bangsa ini



by: udin samsudin.jkt

KORUPSI BAGAIKAN
BOM WAKTU



COMBATING CORRUPTION



THE MISSION CONTINUES





**DASAR HUKUM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**





• Dasar Hukum



- United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Korupsi,2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;



Pasal 1

1

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG KORUPSI, 2003)

Tujuan

- (a) Meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif;
- (b) Meningkatkan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset;
- (c) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik.

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG KORUPSI, 2003)

Pasal 2

Penggunaan Istilah

- (i) Setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif di suatu Negara Pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau untuk sementara, baik digaji atau tidak digaji, tanpa memperhatikan senioritas orang itu;
- (ii) Setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai di Negara Pihak tersebut;



Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi

3

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG KORUPSI, 2003)

Pasal 5

Tindakan Pencegahan

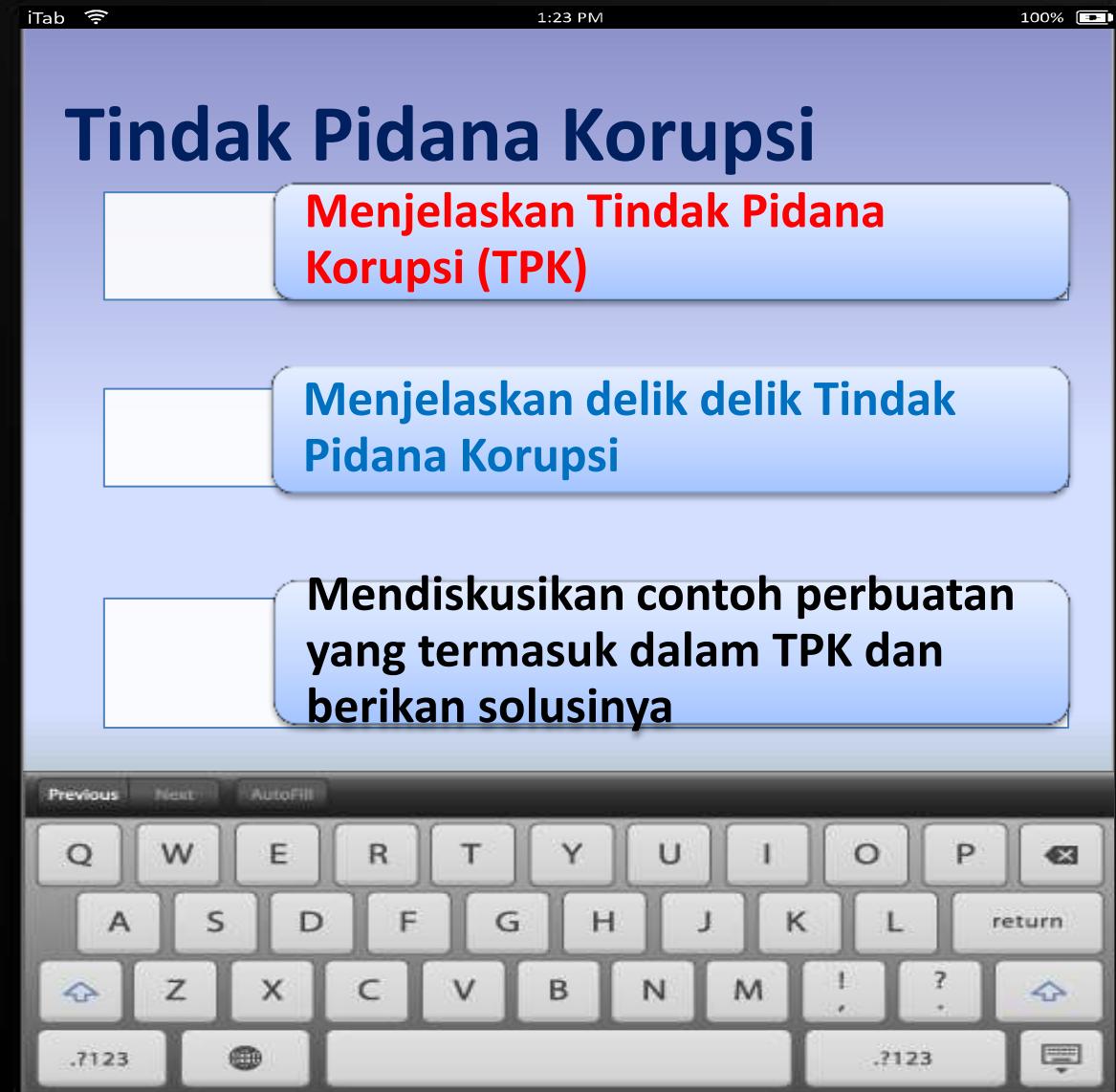
1. Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Negara Pihak wajib mengupayakan untuk membangun dan meningkatkan praktek-praktek yang efektif untuk tujuan pencegahan Korupsi.

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG KORUPSI, 2003)

Pasal 5

Tindakan Pencegahan

3. Negara Pihak wajib mengupayakan untuk mengevaluasi instrumen instrumen hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait secara berkala agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi.
4. Negara Pihak wajib, jika dipandang perlu dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, bekerja sama dengan Negara Pihak lain dan dengan organisasi internasional dan regional yang terkait untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Kerja sama itu dapat meliputi partisipasi dalam program dan proyek internasional yang ditujukan untuk pencegahan korupsi.



Dagang Pengaruh Mesti Dijadikan Delik Hukum

DENGAN adanya pola tindak pidana korupsi baru, yakni mendagangkan pengaruh yang diduga melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, sejumlah pihak mendesak adanya perubahan perangkat regulasi anti-korupsi. Dagang pengaruh mesti dimasukkan sebagai delik hukum.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) Miko Ginting, kemarin. Menurutnya, hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengakomodasi ketentuan mengenai mendagangkan pengaruh. Namun, ketentuan mendagangkan pengaruh sudah terdapat dalam Pasal 18 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Miko lebih lanjut mengatakan, meskipun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dengan UU No 7 Tahun 2006, masih disyaratkan untuk dibentuk ketentuan khusus guna mengimplementasikan delik mendagangkan pengaruh. Dasar jalannya proses peradilan pidana bagi seseorang ialah hanya apa yang sudah terteta dalam undang-undang.

"Karena itu, pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif. Agar kasus dengan pola serupa di kemudian hari dapat diberat dengan delik mendagangkan pengaruh," tukasnya.

Namun, meski hal itu belum diatur dalam UU, Miko mendesak KPK mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam perkara suap kuota gula impor yang menyeret Irman Gusman, komisaris MNC Group, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Tuntas dalam arti KPK harus mampu membongkar semua aktor, pola, dan jaringan dalam kasus ini," tukasnya.

KPK membidik oknum Bulog pada perkara

"Pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif."

Miko Ginting

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

dugaan suap yang melibatkan Irman. "Ini bergantung pada hasil dari pengembangan. Kalau ada buktinya yang mengarah ke sana (ketertibatan oknum Bulog) kita pasti akan melakukan penyelidikan dan penyidikan," terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di Gedung DPR, kemarin.

Syarif hanya mengatakan bahwa KPK sudah mendapatkan informasi bahwa Irman sempat menghubungi Kepala Bulog Djarot Kusumayakti terkait kuota gula impor. "Salah satunya ada rekomendasi."

Menurutnya, KPK akan mengembangkan perkara ini dengan dasar bukti yang nantinya didapat dalam proses penyidikan perkara yang telah menjerat Irman. Itu termasuk mendalami pemberian lain Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi, kepada Irman senilai Rp100 juta. "Itu juga sedang kami dalami," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa pihaknya tidak menargetkan Irman dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya di Jakarta (17/9). "Selalu dari awal laporannya dari masyarakat. Itu juga tidak ditelan begitu saja, selalu kita analisis," terangnya di Gedung DPR. (Cah/X-S)

パン・エ・ガラシ
北欧アイスクリーム
田道家製

MOVIE TIME

WHAT is
GRATIFICATION

KLIPING



LARANGAN GRATIFIKASI TERKAIT PERAYAAN HARI RAYA

Dalam suasana menjelang perayaan hari raya, KPK mengajak seluruh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk memahami sebagai berikut:

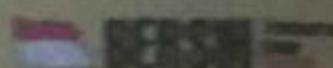
1. KPK mengucapkan selamat kash atas dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi, terutama di dunia usaha dan masyarakat, untuk turut serta menjaga integritas Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
2. Bahwa terjadi kecenderungan meningkatnya kebutuhan dan pengeluaran menjelang perayaan hari raya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penerimaan gratifikasi dari rekan-rekan bisnis masyarakat yang umumnya berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara sebagai pihak yang potensial menerima gratifikasi;
3. Bahwa berdasarkan informasi pengaduan masyarakat dan hasil pemeriksaan kami di lapangan, terdapat sejumlah pemberian dana dan/atau hadiah untuk Tasyakuran Hari Raya (THR) atau sebutan lain dan sejumlah pejabat publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan atau pun tertulis. Hal ini pada prinsipnya dilarang karena merupakan penyalahgunaan wewenang yang menyusut ke arah Tindak Pidana Korupsi (TPK), dapat menimbulkan benturan kepentingan dan menurunkan kepercayaan masyarakat;
4. Terkait dengan ketiasaan menjelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara beserta keluarganya baik secara uang, bingkisan/pesel, fasilitas ataupun pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berawalan dengan kewajiban atau tujuan, pada prinsipnya pemberian gratifikasi sejauh ini wajib ditolak. Namun apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diwanti-wanti perintah pemberian, wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima atau melalui unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di institusi masing-masing pejabat/tujuan/hari kerja setelah diterima;

5. Kepada setiap pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar mendorong penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional dinas oleh pegawai untuk kepentingan pribadi seperti untuk kegiatan mudik, mengingat fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedisiaman dan menutupi bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
6. Kepada Satuan Pengawas Internal atau UPG pada setiap instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD diharapkan melakukan pemantauan, penilaian dan mengkoordinasikan pelaporan penerimaan gratifikasi maupun penggunaan kendaraan dinas oleh pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya. Selanjutnya penerimaan gratifikasi selain yang disampaikan di KPK selama tiga kembangnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
7. Kepada Asosiasi/Gabungan/Himpunan Perusahaan Swasta agar dapat memerintahkan anggota masing-masing untuk tidak memberi sebutan dalam bentuk apapun terkait Perayaan Hari Raya kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan bertemu dengan kewajiban atau tujuan. Apabila dalam kondisi tertentu terpaksa memberikan uang, gratifikasi atau uang pelicit, agar melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama.

Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di www.kpk.go.id/gratifikasi atau email ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau dengan mengakses web pelaporan gratifikasi online di <http://lgi.kpk.go.id> atau menghubungi nomorpon 0855-46-09111 atau 0855-46-09112.

Pimpinan KPK beserta jajaran mengapresiasi seluruh hari raya, semoga Allah SWT memberi幸福 kesehatan dan senantiasa memberikan berkah, amanah, dan perlindungan di setiap pengalaman.

Mohon maaf lahir dan batir



Pengertian Korupsi

Korupsi adalah diskresi dan monopolii tanpa adanya akuntabilitas

$$K = D + M - A$$

*K*orupsi

*D*iskresi

*M*onopoli

*A*kuntabilitas

Diskresi (KBBI) = kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi

Monopoli (KBBI) = hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya)

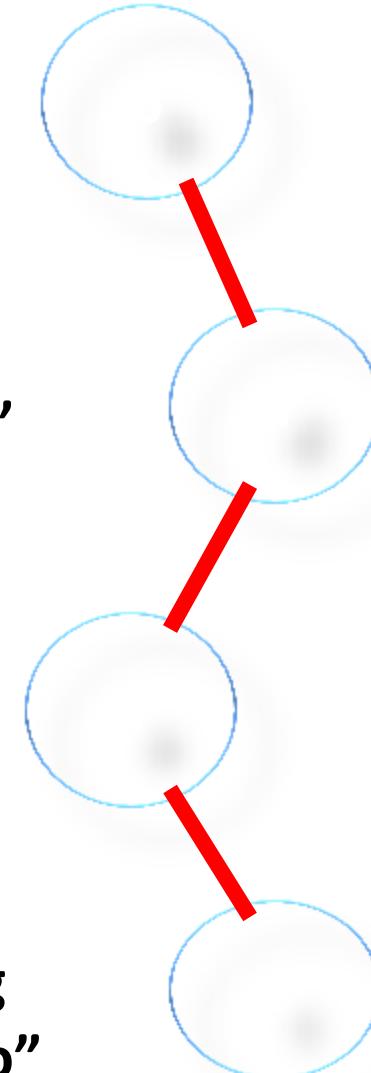
Akuntabilitas (wikipedia) = pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan

China
“Tanwu”

Latin
Corruptio

Jepang
“Oshuko”

Muangthai
“Gin Moung”



Lingkaran dengan kode yang menunjukan arti dari berbagai istilah korupsi :

- a. Kerusakan atau kebobrokan
- b. Makan Bangsa
- c. Kerja Kotor
- d. Keserakahan Bernoda

10 DIMENSI KORUPSI (UN)

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)



Sumber: Tool-Kit Anti Korupsi, Center of International Crime Prevention, UN.



Peta Korupsi

1. Penyelewengan dari target → Audit Perencanaan
2. Pemerasan kepada wajib pajak
→ Transparansi & akuntabilitas sistem pajak
3. Manipulasi data → Perbaikan sistem
4. Terjadi COI → Inisiasi UU COI

1. Penyalahgunaan perizinan
→ Perbaikan sistem kewenangan
2. Tidak ada single data base
→ Integrated database
3. Penyelewengan penyetoran
→ Perbaikan sistem penerimaan

1. Penyimpangan prosedur pengadaan
→ Mendorong eproc, pembentukan ULP, penetapan HPS, pengaturan COI, Whistleblower system, transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan.



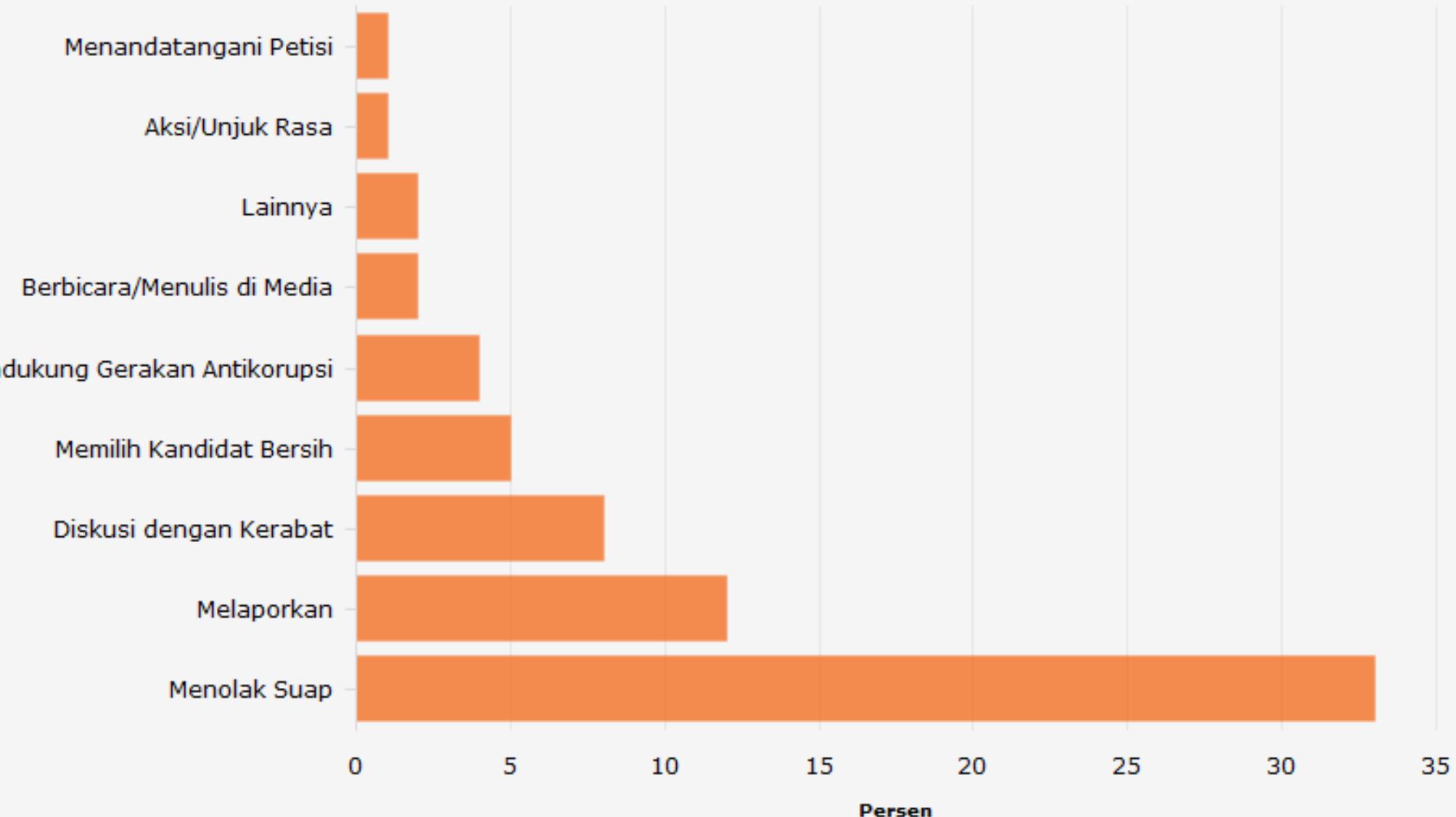
1. Masuk pada APBD:
Penyalahgunaan wewenang, penggelapan
2. Pelaporan tidak standar
3. Alokasi penggunaan tidak transparan
→ Perbaikan sistem

1. PERDA tak mengacu pada perUU – penertiban Perda
2. Penghasilan aparat – penindakan

1. Penyimpangan peruntukan
2. Penggelapan
3. Fiktif
→ Perbaikan sistem penganggaran, Penguatan pengawasan DPR

Bagaimana Upaya untuk Memerangi Korupsi?

Survei Upaya Warga di Indonesia Untuk Melawan Korupsi oleh Transparency International





JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI LAINNYA

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Korupsi Begitu Dekat Dengan Kehidupan Se-hari Hari



Fakta Hukum Dilapangan



Kasus Kasus Dibidang :

**Eksekutif
Legislatif
Yudikatif**



**Terima Duit dari OC Kaligis,
Hakim PTUN Medan Dihukum 2
Tahun Bui**

Ferdinan - detikNews



Foto: Ferdinan/detikcom

Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum hakim PTUN Medan, Sumut, Amir Fauzi, 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Amir terbukti menerima duit suap sebesar USD 5 ribu dari OC Kaligis.

KPK: 39 Persen Perempuan Diam Saja jika Lihat Korupsi

JUM'AT, 13 MEI 2016 | 04:14 WIB



Sejumlah wanita yang tergabung dalam Anggota Perempuan Indonesia Antikorupsi melakukan aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di halaman Gedung KPK, Jakarta, 10 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Balikpapan - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan menyatakan 39 persen perempuan Indonesia diam saja kala mengetahui tindak pidana korupsi. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian Universitas Gadjah Mada terhadap responden di Kota Garut dan Makassar.

2015, Pelaku Korupsi Didominasi PNS

MINGGU, 07 FEBRUARI 2016 | 15:04 WIB



Penuntut umum menunjukkan uang dari dalam kardus duren dalam sidang lanjutan kasus suap Kemenakertrans dengan terdakwa Dharnawati di Pengadilan Tindak pidana korupsi, Jakarta (5/12). Dharnawati mengaku sempat kesal karena terus didesak untuk membayar commitment fee oleh pejabat Kemenakertrans. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kajian Indonesia Corruption Watch terhadap vonis perkara korupsi selama 2015 menunjukkan angka korupsi di lingkaran pemerintah, terutama pemerintah daerah, masih tinggi.

"Pantauan kami, ada 225 terdakwa korupsi dari lingkungan pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah. Sementara itu, di swasta, ada 140 terdakwa," ujar anggota Divisi monitoring dan Hukum Peradilan ICW Aradila Caesar, Ahad, 7 Februari 2016.

Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi



1. Memutar Film "Integrasi(kan) Integritas"
2. Berikan kesimpulan dari Film "Integrasikan Integritas" tersebut.
3. Apa kaitannya Film tersebut dengan Niat, Semangat dan Komitmen Anti Korupsi?
4. Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi sudah dilakukan tetapi korupsi masih tetap jalan terus, korupsi bahkan terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mengapa korupsi masih terus berjalan? Langkah apa yg perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

D

Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi

SPIRITUAL

ACCOUNTABILITY yang baik
akan menimbulkan Niat Baik





D

Niat, Semangat & Komitmen Anti Korupsi

Spiritual Accountability

Visi & Misi Baik

Usaha Terbaik

Hasil Terbaik

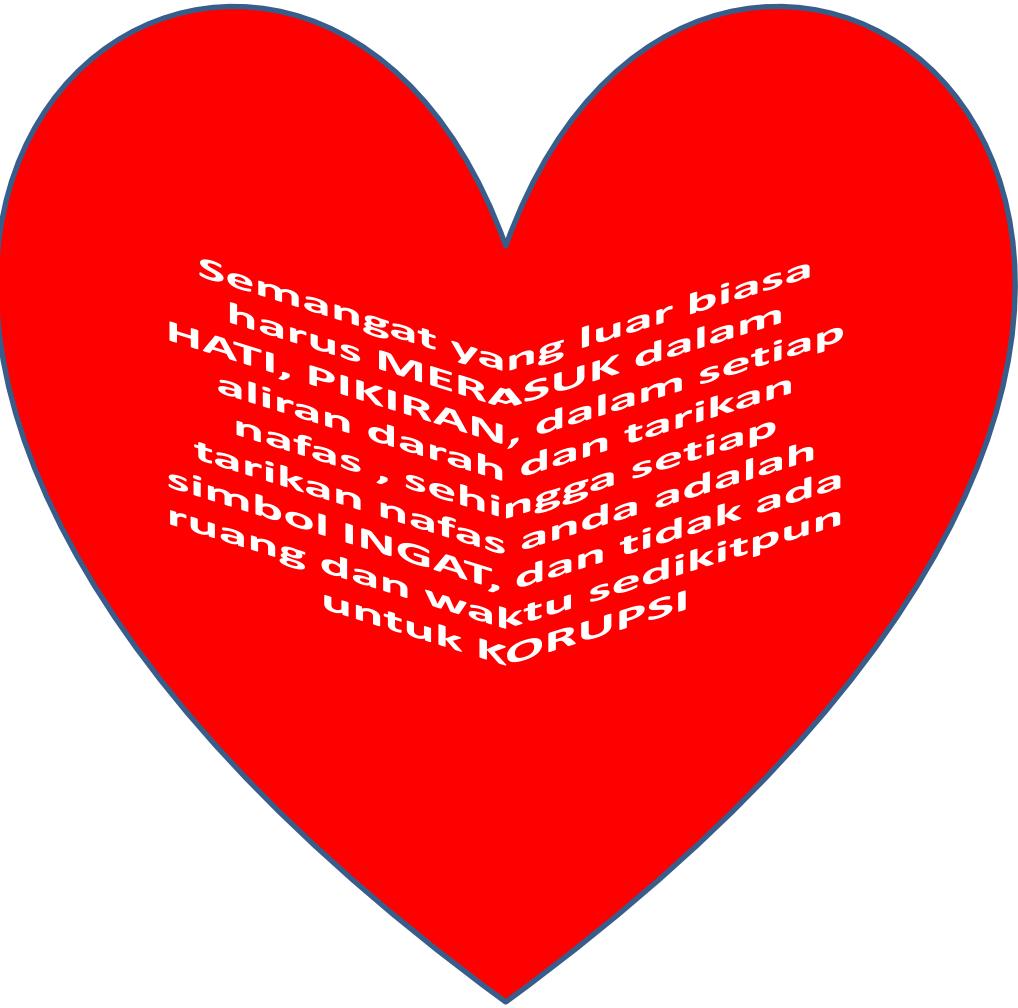
AMANAH, kesadaran diri bahwa hidup kita harus dipertanggung jawabkan mereka yang amanah akan selalu ingat perjanjian dengan Tuhan, pada saat di alam Ruh

NIAT BAIK

Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhan, ia tidak ingin merusak perjanjian dengan Tuhan dan akan menjadi beban bagi kehidupan sehari-hari

SPIRITUAL ACCOUNTABILITY yang baik akan menimbulkan Niat Baik

SEMANGAT ANTI KORUPSI



Semangat yang luar biasa harus MERASUK dalam HATI, PIKIRAN, dalam setiap aliran darah dan tarikan nafas , sehingga setiap tarikan nafas anda adalah tarikan INGAT, dan tidak ada simbol INGAT, dan tidak ada ruang dan waktu sedikitpun untuk KORUPSI

Stephen L Carter (1996)

Integritas Merupakan Upaya Positif Terkait Korupsi

KOMITMEN INTEGRITAS



SAAT ANDA TELAH MENCAPAI KESADARAN ANTI KORUPSI SECARA MENYELURUH DAN UTUH, MAKA HAL TERSEBUT TIDAK HANYA SAMPAI MENJADI SEMANGAT, NAMUN AKAN TERUS BERGERAK HINGGA MENJADI KOMITMEN INTEGRITAS. ANDA SUDAH MELANGKAH LEBIH JAUH , BUKAN SEKEDAR MENGHINDARI NAMUN MENCARI SOLUSI TERHADAP FENOMENA KORUPSI



ASN DAN CITA-CITA BANGSA

- Undang-Undang ASN lahir dalam rangka mencapai cita-cita bangsa
- Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD R.I Tahun 1945
- Bahwa untuk mencapai tujuan bernegara, antara lain memajukan kesejahteraan umum diperlukan Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan Pemerintah Negara yang : (1) Profesional (2) bebas dari intervensi politik (3) bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta (4) mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
- Amanat Undang-Undang ASN bahwa Aparatur Sipil Negara harus mampu memerankan diri sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INDONESIA BEBAS DARI KORUPSI



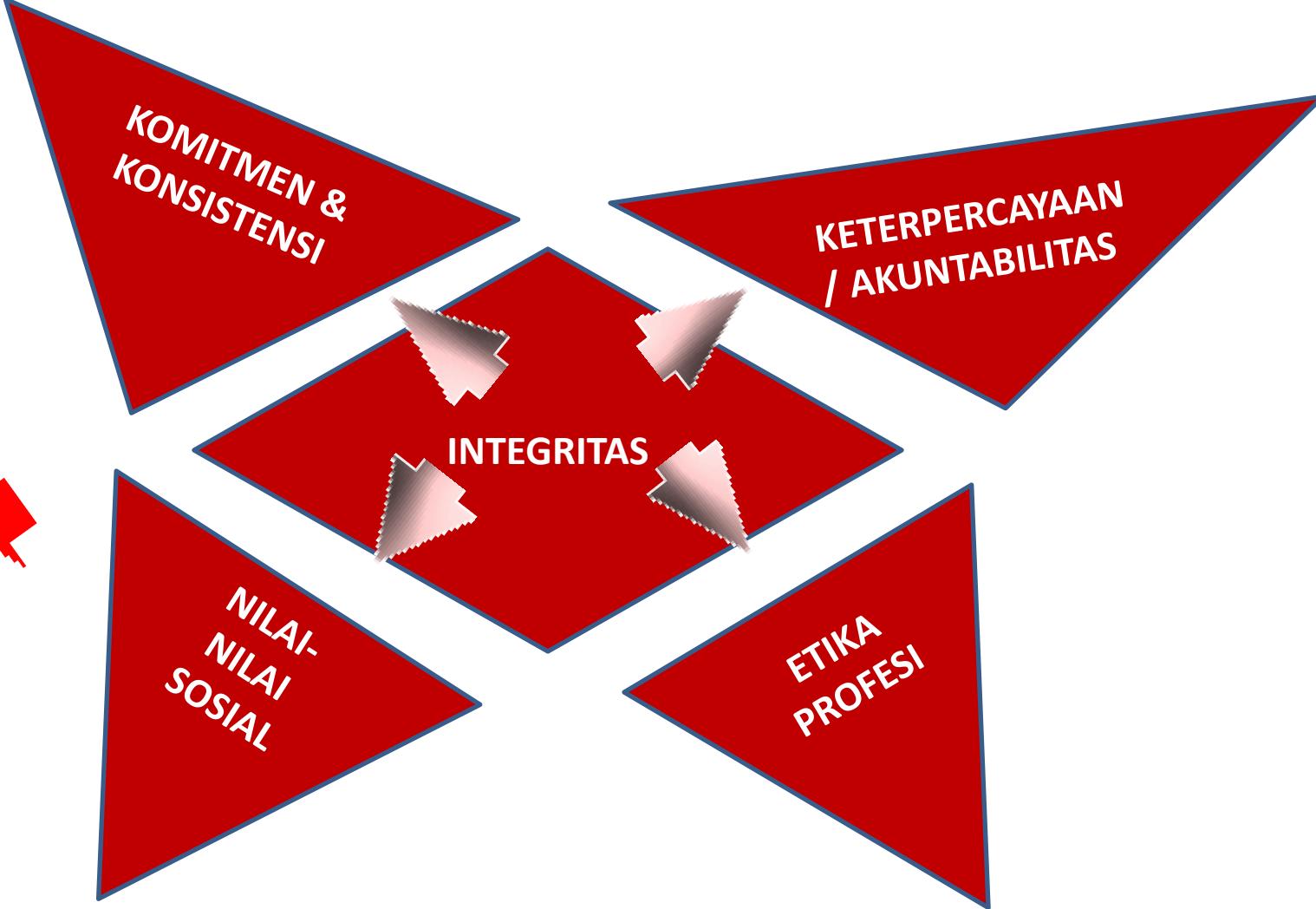
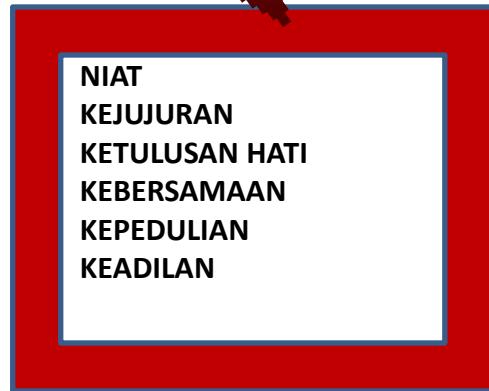


INDONESIA BEBAS DARI KORUPSI



SIN : Sistem Integritas Nasional adalah inisiatif KPK untuk mencegah korupsi secara terintegrasi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan nasional

Dreamtegrity : Impian Indonesia Berintegritas





Tes Formatif

1. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi:
 - A. Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi!
 - B. Mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi
 - C. Mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan menjauhkan diri dari korupsi
 - D. Mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi
2. Pernyataan dampak korupsi yang mana merupakan pendapat Paulo Maura (1995) :
 - A. Negara korup harus membayar hutang lebih besar
 - B. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing
 - C. Korupsi menurunkan investasi
 - D. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan



3. Berdasarkan sudut pandang Sistem Integritas Nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah :
 - A. Membuat sengsara para koruptor beserta keluarga dan keturunannya
 - B. Menghukum para koruptor dengan hukuman yang paling lama dan kalau bisa sampai dihukum mati
 - C. Memastikan tujuan nasional dapat tercapai
 - D. Dikenal di dunia internasional sebagai negara contoh pemberantasan korupsi
4. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability:
 - A. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, kemudian niat baik akan mendorong untuk menghasilkan visi dan misi yang baik dan diterjemahkan menjadi usaha dan hasil terbaik
 - B. Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik, terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layanan publiknya masih jelek dan tingkat korupsinya masih tinggi
 - C. Spiritual accountability akan membuat manusia untuk selalu ingat pada tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidupnya harus dipertanggungjawabkan!
 - D. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya!



5. Tuliskan 7 delik tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia?

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____
- g. _____

6. Buatlah tulisan sebanyak minimal 300 kata yang:

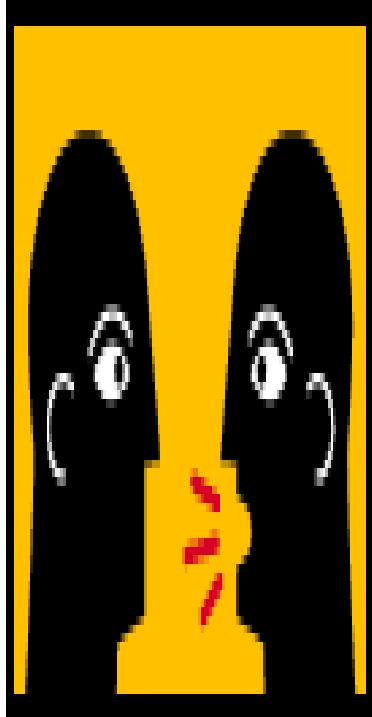
- a. Mencerminkan penguasaan Anda terhadap seluruh materi modul “Sadar Anti Korupsi”
- b. Mencerminkan pengalaman yang dialami terkait dengan materi yang dipelajari dalam modul
- c. Mencerminkan keinginan atau rencana yang akan dilakukan atas inspirasi yang diperoleh dari modul



Review Dan Diskusi Kasus

1

Tujuan review dan Diskusi Kasus



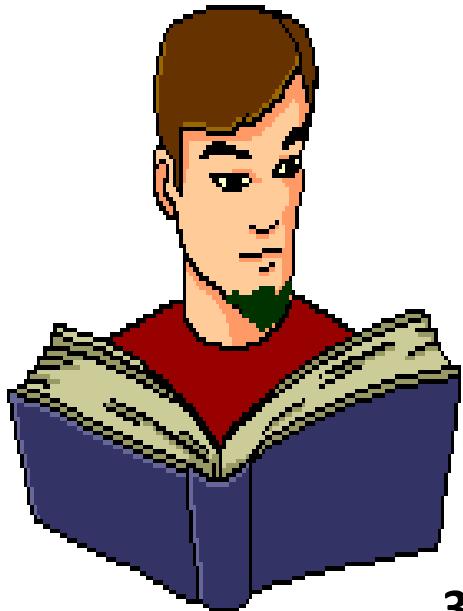
1. Mengelompokkan jenis-jenis (modus) perilaku penyimpangan/Korupsi Contoh Kasus :
Proses pengadaan barang dan jasa di setiap tahapan dengan menentukan secara jelas kategori pelaku dari setiap perilaku yang berhasil diidentifikasi

2. Mengidentifikasi penyebab terjadinya perilaku penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Instansi, dengan:
Menganalisis faktor penyebab di tingkat substansi peraturan perundang-undangan yang turut mendukung berbagai perilaku penyimpangan/kesalahan tersebut;
Mengidentifikasi faktor-faktor struktural, terutama pada institusi *user yang memberi peluang terjadinya perilaku penyimpangan*
Melakukan penilaian efektivitas sosialisasi peraturan maupun SOP yang mengatur tentang proses lelang untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah kepada targetnya (pihak-pihak yang terlibat)



Review Dan Diskusi Kasus

Lanjutan



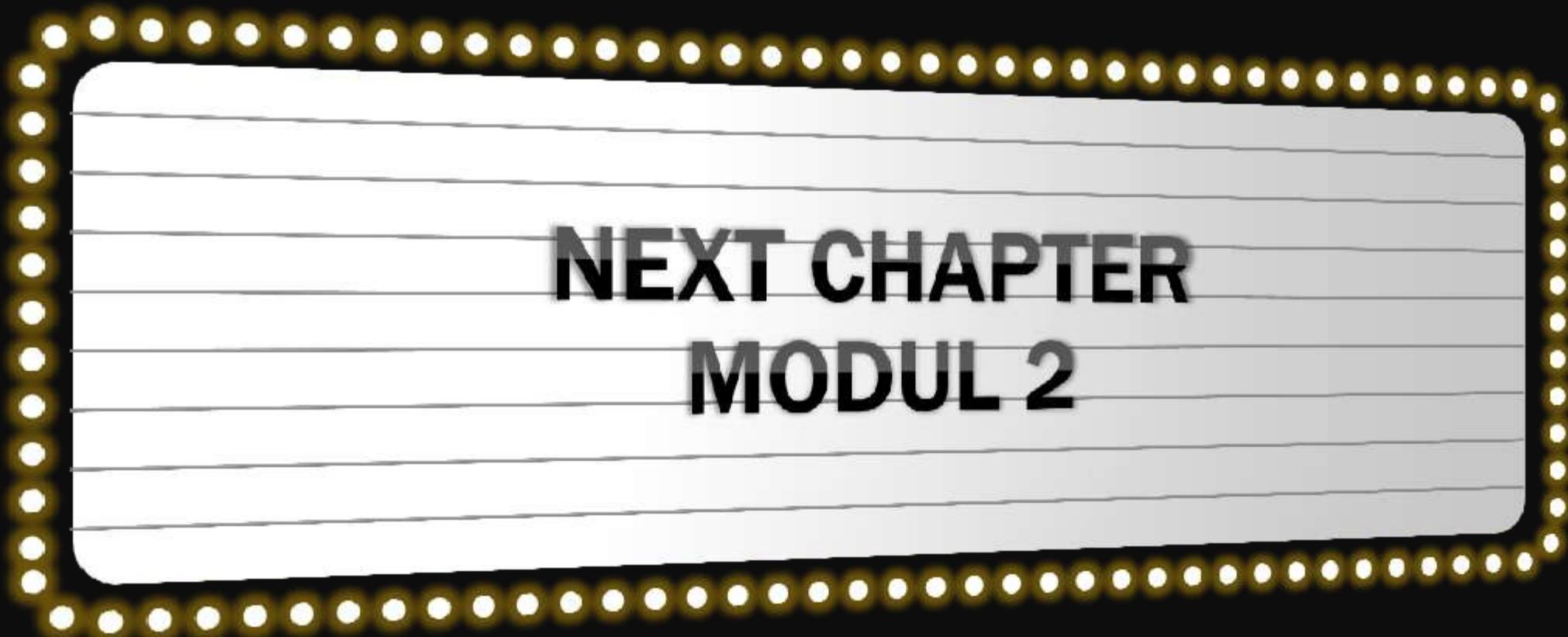
Menganalisis kapasitas institusional dari institusi user maupun kualifikasi individual pejabat yang berwenang menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa di institusi user

Mengidentifikasi kepentingan ekonomis dan non ekonomis yang melatar belakangi perilaku penyimpangan/kesalahan dalam pengadaan barang/jasa

Mengidentifikasi prosedur dan kriteria pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang/jasa , berikut kesenjangan nya dengan praktek

Mengidentifikasi faktor budaya, cara pandang, nilai dan sikap, secara kelembagaan (birokrasi) maupun individual yang mendorong perilaku menyimpang.

3. Merumuskan rekomendasi baik normatif (pembentukan peraturan perundangan dan peraturan teknis pelaksanaannya) maupun berupa rencana tindak (action plan) yang berguna bagi proses pengawasan kegiatan



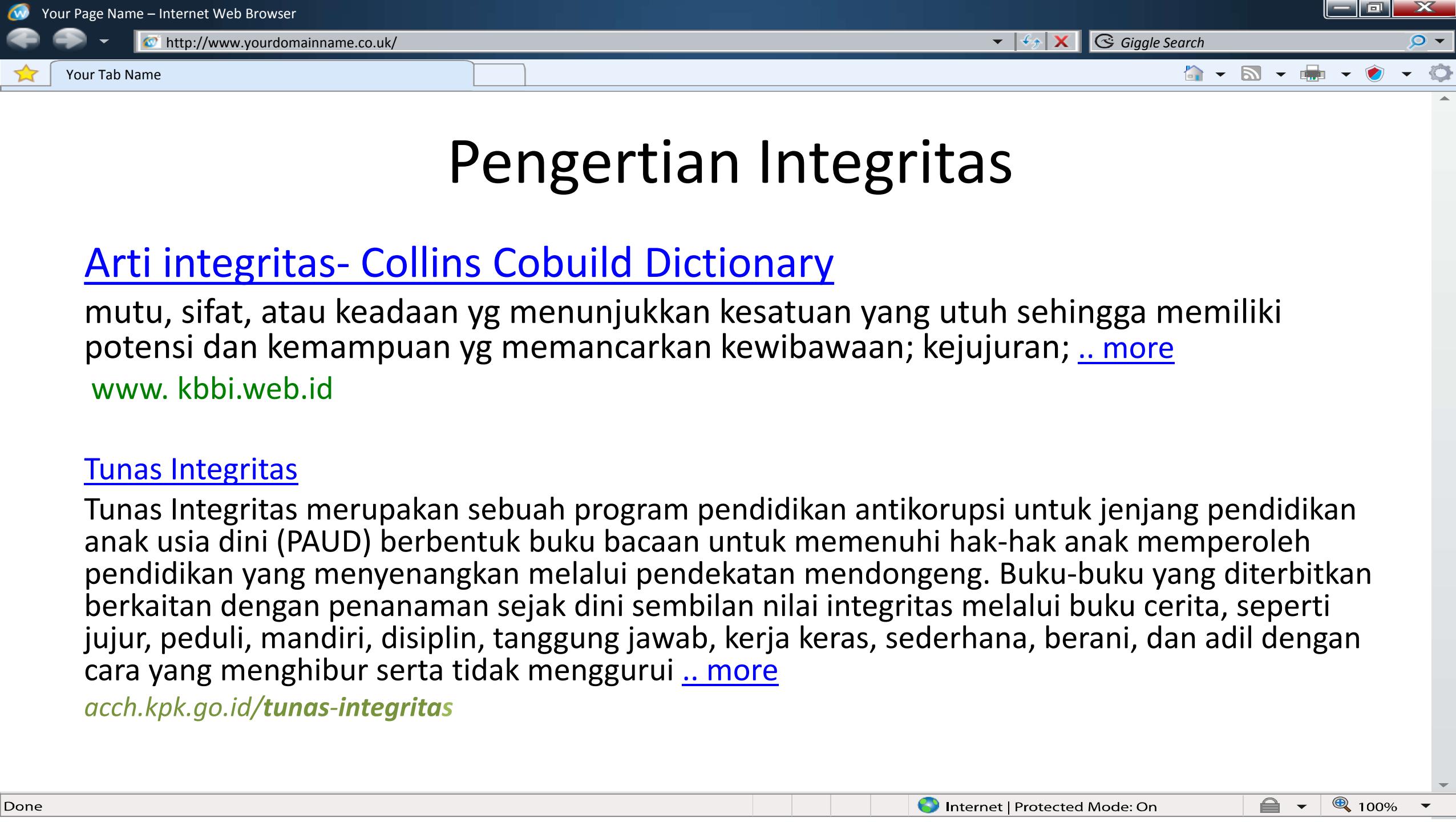
NEXT CHAPTER MODUL 2



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu memiliki pemahaman yang jelas dan contoh nyata cara menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi, Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat :

1. Menjelaskan peran tunas integritas dalam pemberantasan korupsi
2. Menentukan nilai nilai dasar anti korupsi yang paling signifikan bagi Anda dan instansi tempat Anda akan bekerja
3. Memiliki teknik sederhana dalam internalisasi integritas sebagai salah satu upaya untuk menghindari korupsi
4. Melakukan re-framing untuk memudahkan proses internalisasi integritas
5. Memahami seeding dan perilaku otomatis dalam konteks perilaku anti korupsi
6. Menjelaskan peran sistem integritas organisasi untuk menjaga individu berintegritas





Tunas Integritas



Memutar Film “[Tunas Integritas](#)”





Peran Tunas Integritas

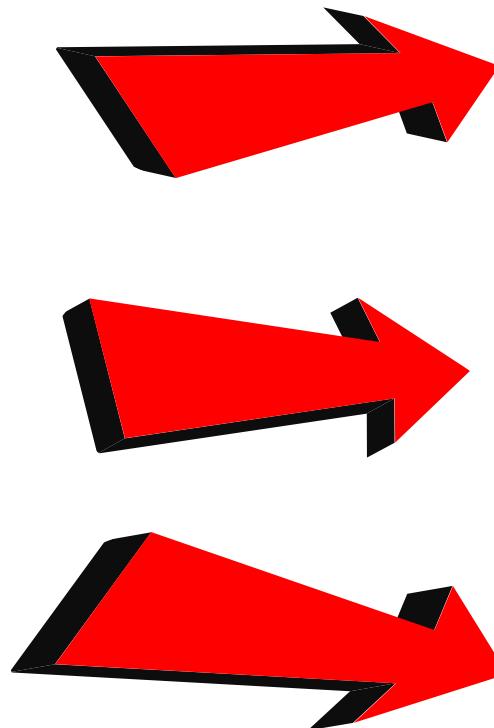
Tunas Integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa:



1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.
2. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya tidak terjadi.
3. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi



Tunas Integritas



p e m b a n g u n a n
sistem



Implementasi upaya
pemberantasan korupsi
secara konsisten dan
berintegritas



Menjalankan program
dengan penuh keikhlasan
sebagai basis bekerja
berdasarkan moral idealisme
(bukan sekedar idealisme)



- ✓ **Tugas dan kewajiban utama aparatur pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat**
- ✓ **Pelayanan yang bernilai harus di dukung oleh Integritas**
- ✓ **Tanpa integritas akan terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan aparat dari setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat**



Jaya Tunas Integritas

Konsep diri sebagai seorang tunas integritas



- **Membangun sistem yang kondusif**
- **Menyelaraskan antara rohani dan jasmani**

Penyelarasan pada semua elemen dirinya (jiwa, pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan) dengan nurani (standar kebaikan universal), sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras pula dengan berbagai situasi dan lingkungan (sistem dan budaya integritas)

Your Page Name – Internet Web Browser

http://www.yourdomainname.co.uk/ Giggle Search

Your Tab Name

Tunas Integritas

Tunas Integritas tidak mendorong masyarakat dan K/L/O/P untuk membangun budaya baru, atau mengambil budaya dari luar Indonesia, tetapi akan melakukan reframing budaya yang ada, yaitu dengan menggeser dari kutub negatif menjadi kutub positif, dengan tetap memelihara kebiasaannya atau perilaku otomatis (sesuatu yang telah terbentuk dan menyatu kuat dalam diri)

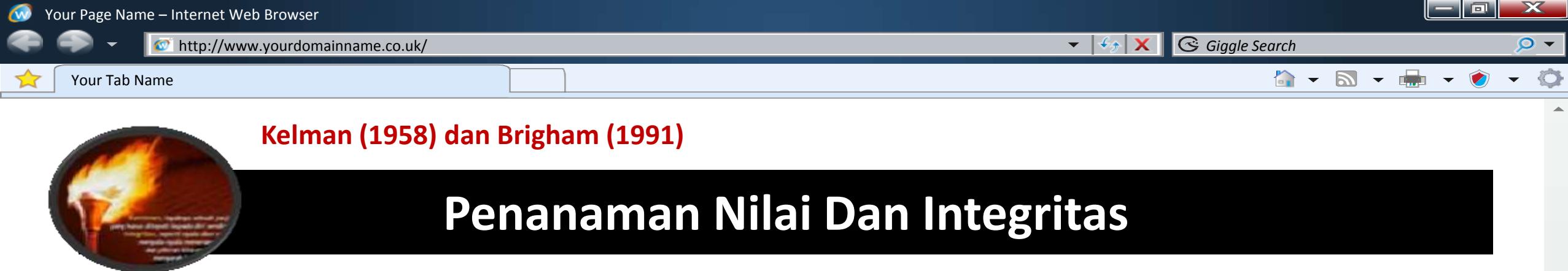
Integritas

- ✓ Integer, Incorruptibility, bahasa latin = murni, utuh, jujur dan dapat dipercaya dan dapat diandalkan
- ✓ Menunjuk pada eksistensi manusia seutuhnya, yaitu selarasnya antara niat perkataan dan perbuatan
- ✓ Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran

Tunas Integritas merupakan sebuah program pendidikan antikorupsi untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) berbentuk buku bacaan untuk memenuhi hak-hak anak memperoleh pendidikan yang menyenangkan melalui pendekatan mendongeng. Buku-buku yang diterbitkan berkaitan dengan penanaman sejak dini sembilan nilai integritas melalui buku cerita, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dengan cara yang menghibur serta tidak mengurui.



Internet | Protected Mode: On 100%



Kelman (1958) dan Brigham (1991)

Penanaman Nilai Dan Integritas

Tiga proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, Yaitu :



- Kesediaan (Compilience)
- Identifikasi (Identifikation)
- Internalisasi (Internalization)

Integritas

- sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia, dengan demikian salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui tiga proses perubahan sosial dari Kelman dan Brigham tersebut



*Alam bawah sadar, ibarat lautan luas
di sekeliling pulau kecil kesadaran*



Penanaman Nilai dan Integritas

Teknik lainnya

Simbolisasi

Dis Asosiasi

Multi Protection

Change belief



Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi



PIKIRAN MANUSIA
SESUNGGUHNYA MEMILIKI
KEMAMPUAN TAK
BERBATAS, KECUALI BAGI
MEREKA YANG
MENGANGGAPNYA
TERBATAS. KAYA ATAU
MISKIN TAK LAIN ADALAH
BUAH DARI PIKIRAN
ANDA SENDIRI

- 1) jujur**
- 2) peduli**
- 3) mandiri**
- 4) disiplin**
- 5) tanggung jawab**
- 6) kerja keras**
- 7) sederhana**
- 8) berani**
- 9) adil**



Penyelarasan Nilai Organisasi Dan Nilai Anti Korupsi

Tugas Kelompok



- Nilai-nilai Dasar Organisasi Anda ? Selaraskah dengan nilai anti korupsi ?
- Lakukan pengecekan bahwa visi dan misi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal, sehingga proses penyelarasan nilai yang dilakukan adalah memastikan bahwa nilai-nilai yang dipilih mempunyai signifikansi atau hubungan yang sangat kuat

Contoh tabel penyelarasan nilai organisasi

Nilai	Data	Data	Data	Data	Data	DST	Rata-Rata
Nilai X	1	2	3	4	5		
Nilai Y	3	2	3	3	3	3	2,9
Nilai Z	3	1	2	2	2	2	2,4
DST							

Hasil kegiatan di atas akan menjadi penting bagi penentuan prioritas dan alokasi waktu dan sumber daya dalam melakukan internalisasi nilai-nilai. Besaran angka dari setiap nilai dapat diutilisasi untuk berbagai kepentingan atau kebijakan yang mempunyai keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi.



Proses Internalisasi Integritas

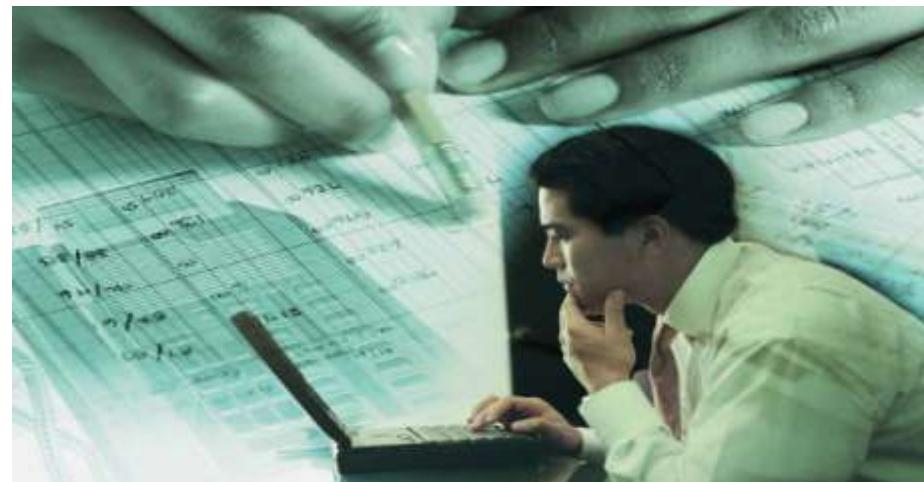


Pemahaman tentang pentingnya internalisasi integritas yang lebih permanen bertahan dalam diri seseorang, membuat Anda mempunyai keinginan kuat untuk mempelajari beragam teknik yang diperlukan untuk melakukan internalisasi integritas.



Proses Internalisasi Integritas

Pemahaman Anda yang bertambah tentang bawah sadar dan kemampuan luar biasa manusia, semakin membuat Anda yakin bahwa Internalisasi bisa dijadikan kerangka perubahan integritas diri dan masyarakat yang efektif





Proses Internalisasi Integritas

internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan out side in. Untuk terjadinya hal tersebut maka:

1. Perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif
2. Pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran (diri)
3. Segera lakukan teknik perubahan sistem nilai
4. Agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif!





Proses Internalisasi Integritas

MAS AURA

7 Kompetensi Dasar Internalisasi

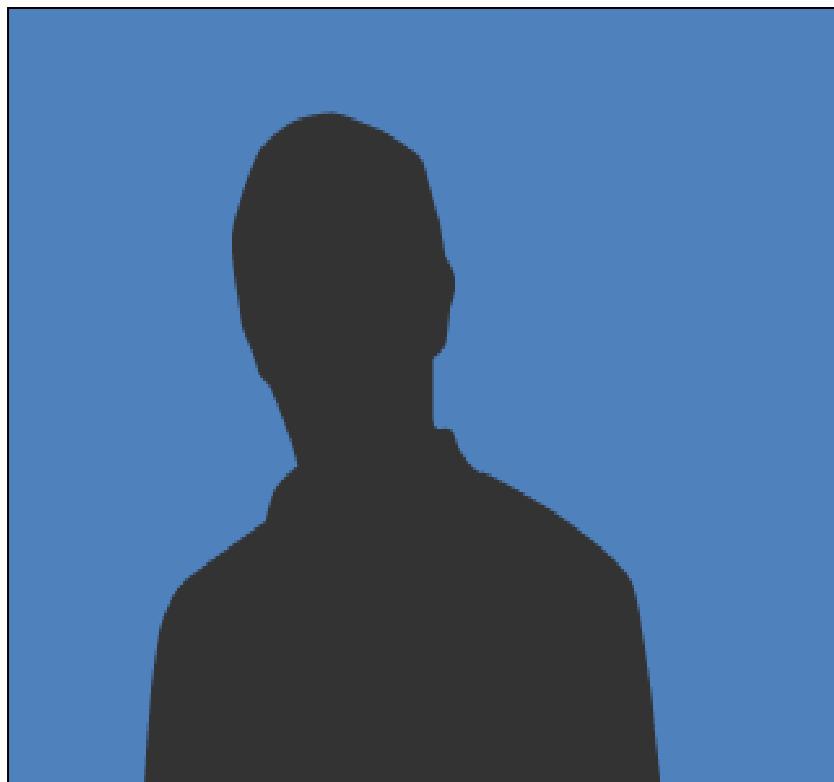
- 1. Modality
- 2. Asosiasi
- 3. Sugesti
- 4. Anchoring
- 5. Utilisasi
- 6. Rileksasi
- 7. Amplify

KOMPETENSI

www.dailynews.com

THE WORLD'S FAVOURITE NEWSPAPER

- Since 1879



MAS AURA

Modality Bagaimana Sesuatu dilakukan

Asosiasi..... tautan di ingatan pd orang atau barang lain; pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan pancaindra

Sugesti..... pendapat yg dikemukakan (untuk dipertimbangkan); anjuran; saran; pengaruh dsb yg dapat menggerakkan hati orang dsb; dorongan

Anchoring..... Melabuhkan memory positif

Utilisasi..... Sinergi

Rileksasi.....

Amplify..... Memperkuat (menyatukan)

パン・ナガネ子供会館
北島アイスクリーム
田道家業

MOVIE TIME

WHAT is
SISTEM INTEGRITAS



Bangun Sistem Integritas

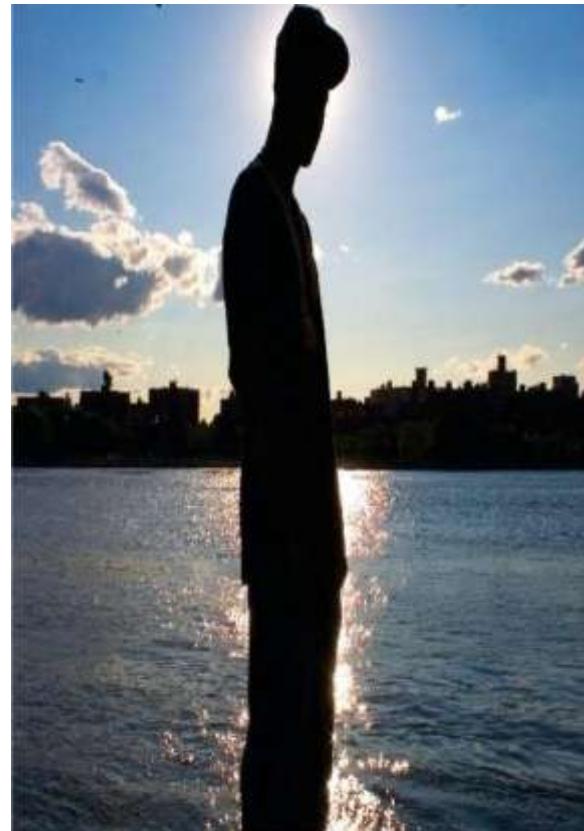
- 1). Menjelaskan Re-framing Culture**
- 2). Meminta peserta membuat contoh perubahan
dari perilaku negatif ke positif**
- 3). Menjelaskan dan Internalisasi seeding of
Integrity**
- 4). Menjelaskan Sistem Integrasi organisai
melalui Leadership Risk, sistem
pengendalian dan komponen sistem
Integritas**



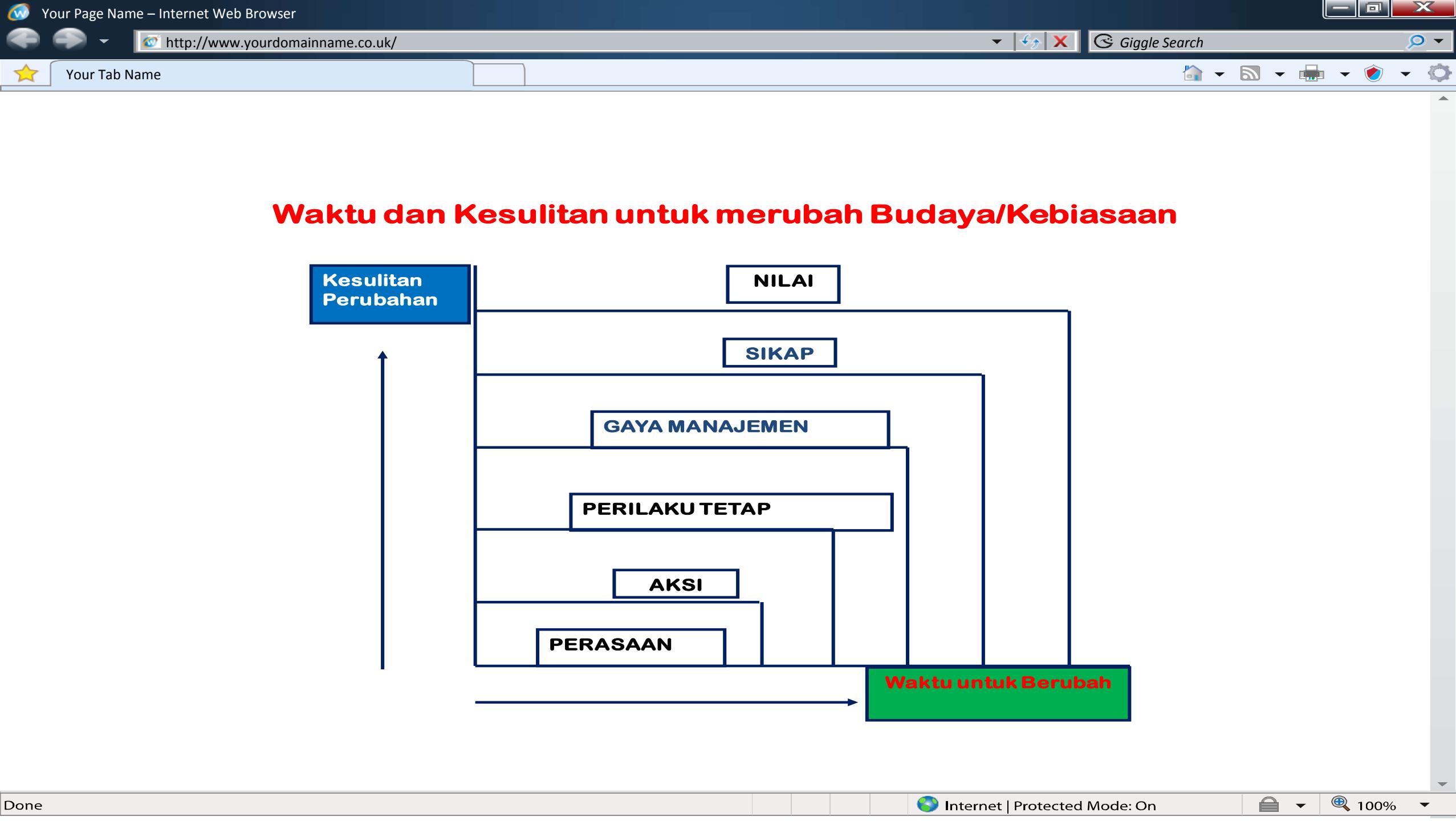


Bangun Sistem Integritas

Dengan memiliki kemampuan untuk melakukan:



- 1) Re-framing kultur atau budaya, agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat, serta tidak perlu energi besar, atau dengan istilah-istilah semacam “potong generasi”, namun membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk semua elemen bangsa, baik generasi lalu, generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi melalui re-framing budaya.
- 2) Utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga , organisasi dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik.

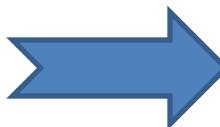


RE-FRAMING



Pernahkah anda merasa tidak bersemangat dalam menjalani pekerjaan?

Pernahkah anda merasa begitu marah kepada seseorang karena tindakannya yang tidak membuat anda nyaman?



Pernahkah anda merasa sedih karena kesalahan yang telah anda perbuat?

Jika salah satu atau bahkan semua jawaban dari pertanyaan diatas adalah "Ya",

RE-FRAMING

Respon kita terhadap suatu stimulus adalah :



- merupakan suatu pilihan
- bukan merupakan suatu respon otomatis yang sifatnya mutlak.
- Saat kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari orang lain,
biasanya kita akan marah terhadap orang itu.
- Pertanyaan nya adalah, respon marah itu merupakan sesuatu yang
otomatis dan mutlak, atau merupakan pilihan yang kita ambil?
- Kita pasti akan menyetujui bahwa respon marah itu adalah pilihan yang
kita ambil dan bukan merupakan respon otomatis.
- Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa respon marah
yang kita pilih?
- Apakah itu adalah pilihan yang terbaik? Mengapa terdapat kesan
bahwa respon marah itu otomatis muncul jika ada stimulus yang
tidak mengenakkan kita?

A NEGATIVE
MIND WILL
NEVER
GIVE YOU A
POSITIVE LIFE

RE-FRAMING

Setiap event

atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita adalah bernilai netral. Namun, pada saat pikiran kita memberikan makna atau penilaian terhadap suatu peristiwa maka pada detik itu juga peristiwa tersebut memiliki nilai dan muatan emosi.



Apabila makna positif yang dilekatkan, maka peristiwa tersebut akan memiliki muatan positif. Sebaliknya, apabila makna negatif yang diberikan maka peristiwa tersebut akan memiliki muatan negatif.

RE-FRAMING

Memberi makna yang lebih positif dan bermanfaat dalam berbagai peristiwa yang Anda lalui dalam hidup Anda.

Kemampuan untuk memberikan makna positif dan bermanfaat dari suatu event atau peristiwa disebut dengan REFRAMING atau membingkai ulang makna dari suatu kejadian dengan bingkai yang lebih baik lagi.



RE-FRAMING



Orang-orang yang sukses dan bahagia adalah orang-orang yang piaawai dalam membingkai ulang apapun peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dengan makna yang lebih positif dan bermanfaat. Ini adalah rahasianya. Sekarang Anda sudah mengetahui rahasia tersebut.

**Positive thinking is
nothing unless you take
a positive action.. An action
is nothing unless you face
challenges and rejections..
Think positively.. plan
creatively and act differently
Achieve Goals / Facebook
is the way of success.. ♡**

RE-FRAMING CULTURE



Salah satu contoh reframing culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran (paradigma) atau kita sebut sebagai konten dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi (konteks) menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia.

Gotong Royong

Kandungan Budaya

Perilaku

Dilakukan bersama-sama

Ucapan

Ajakan bersama-sama
Bersama kita bisa!

Emosi

Menyukai kebersamaan
Senang saling bantu

Pikiran

Punya persepsi bahwa bersama-sama
lebih baik atau mudah

Mengubah orientasi (niat)
tanpa harus mengubah kandungan yang
membentuk budaya

BUDAYA

Reframing
Culture

Kolusi



7 semangat dasar yang diharapkan dapat di tumbuhkan kembali di bumi Pertiwi Indonesia

- 1. Semangat ketakwaan pada Tuhan;**
- 2. Semangat keikhlasan dan ketulusan;**
- 3. Semangat pengabdian dan tanggungjawab;**
- 4. Semangat menghasilkan yang terbaik;**
- 5. Kekeluargaan;**
- 6. Semangat keadilan dan
kemanusiaan;**
- 7. Semangat perjuangan;**



B. SEEDING OF INTEGRITY!



Seeding Of Integrity

upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan dan budaya integritas. Seakan menjadi suatu pertempuran antara integritas dan korupsi, saling memperkuat untuk mempengaruhi pegawai negeri di Indonesia.

SEEDING = Penempatan

Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi:

- 1. Koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem**
- 2. Koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia**
- 3. Koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya diluar perkiraan (WOW effect)**



Simulasi dialog pengaruh koruptor terhadap pegawai negeri dengan memberikan beragam penawaran uang yang semakin besar, dimana pegawai negeri hanya diminta untuk menjawab "ya" atau "tidak" terhadap penawaran keuntungan dari penyimpangan.



Misalkan penawarannya dari satu juta, sepuluh juta, seratus juta, satu milyar, seratus milyar sampai satu trilyun.

Biasanya jawaban "ya" dan "tidak" yang dilakukan pegawai negeri sering diikuti dengan perubahan :

Lanjutan

1) ketegasan jawaban, semakin lama menyampaikan jawaban tidaknya

(2) intonasi, terjadi perubahan intonasi

(3) perubahan raut muka dan perilaku

misalkan diikuti dengan senyuman, kedipan mata, perubahan gerakan bibir,
perubahan posisi duduk atau badan, dll.

Simulasi dialog tersebut bukan merupakan peristiwa nyata, hanya diminta untuk
membayangkan sedang terjadi godaan, muncul pertanyaan “bagaimana jika
memang kenyataan?

be the difference that
makes the difference



Wow effect

korupsi inilah yang menyebabkan mereka yang secara ekonomi dan status sosial, idealnya tidak melakukan korupsi namun akhirnya mereka terpengaruh. Inilah yang menyebabkan orang lupa diri. Wow effect dari pengaruh uang tersebut akan semakin besar.



Manakala sudah terbentuk lingkungan dengan istilah “Keuangan Yang Maha Kuasa”, bukan lagi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

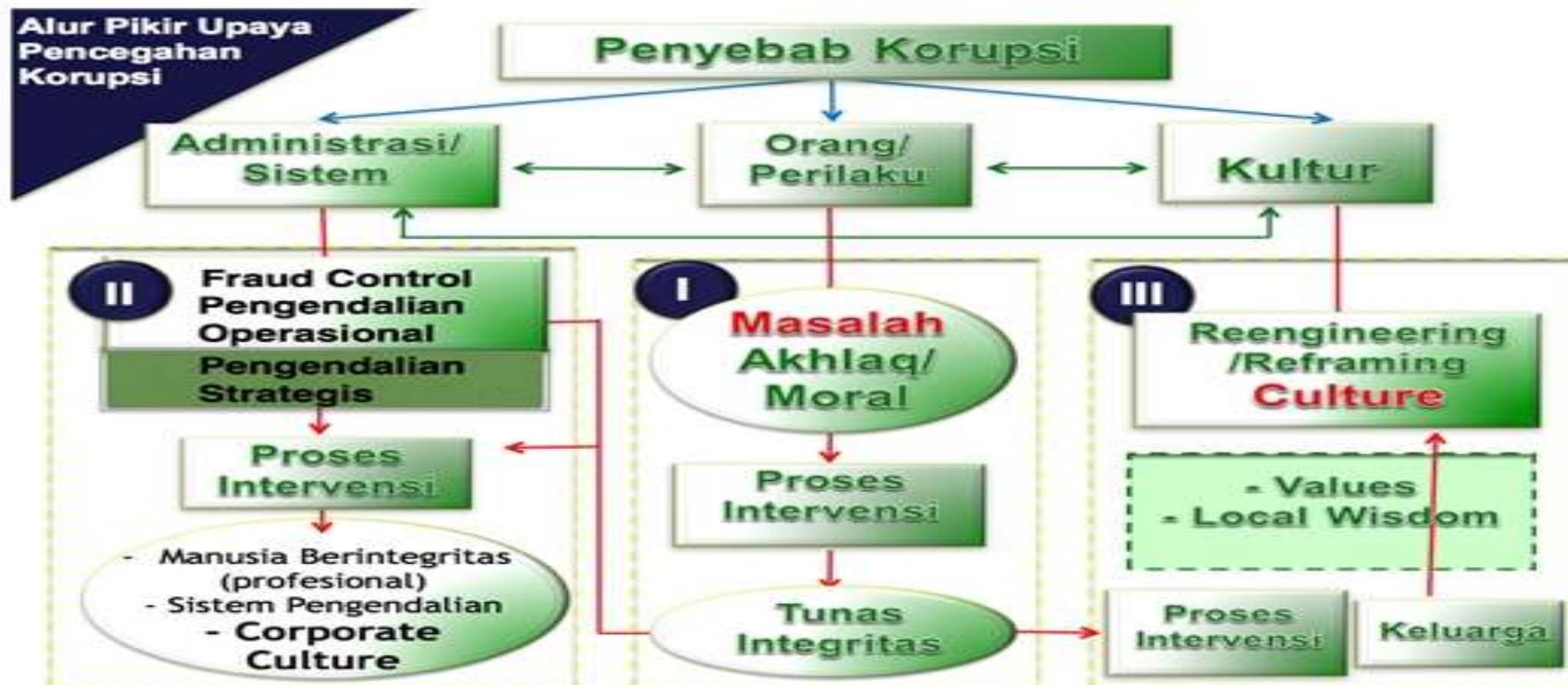
Dengan mempelajari mekanisme berpikir, bersikap dan bertindak manusia maka akan didapatkan pola sebagai berikut:

1. Stimulus wow effect korupsi lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan kekuatan kontrol internal (nurani), akan memunculkan kecenderungan korupsi
2. Kekuatan kontrol internal (nurani) dan stimulus korupsi yang biasa (tanpa wow effect) atau lemah
3. Kekuatan kontrol internal (nurani) lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan stimulus wow effect korupsi. Akan memunculkan kecenderungan integritas





SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI



KARAKTERISTIK INTEGRITAS

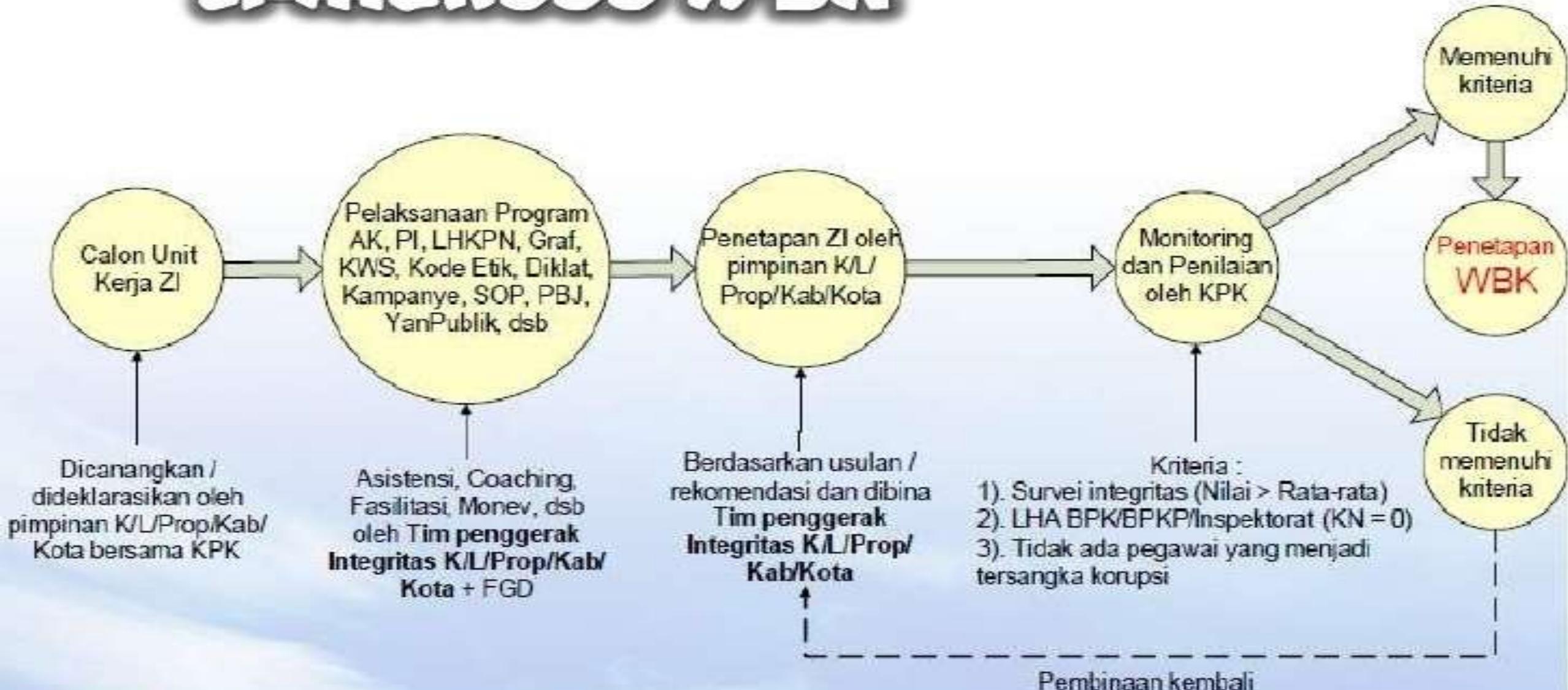
(Andrian Gostick & Dana Telford)

1. Menyadari hal-hal kecil itu penting.
2. Menemukan yang benar (saat orang lain melihat abu-abu).
3. Bertanggung jawab.
4. Menciptakan budaya kepercayaan.
5. Menepati janji.
6. Perduli terhadap kebaikan yang lebih besar.
7. Jujur namun rendah hati.
8. Bertindak bagaikan tengah diawasi.
9. Mempekerjakan integritas.
10. Konsisten

C. SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI



ZI MENUJU WBK



(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)

INDIKATOR MUTLAK WBK

- **Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda** adalah Opini Keuangan BPK sekurang-kurangnya WDP pada saat pengajuan calon WBK .
- **Indikator Mutlak pada tingkat Unit/Satuan Kerja:**
 - nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;
 - nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB;
 - jumlah maksimum kerugian negara (KN) yg belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian BPK;
 - jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilaian APIP;
 - persentase maksimum jumlah pegawai yg dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yg tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;
 - persentase maksimum jumlah pegawai yg dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

INDIKATOR UTAMA WBK (60%)

- Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
- LHKPN;
- Akuntabilitas Kinerja;
- Laporan Keuangan;
- Kode Etik;
- Sistem Perlindungan Pelapor (*whistle blower system*);
- Program Pengendalian Gratifikasi;
- Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*);
- Program Inisiatif Anti Korupsi;
- Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (*post employment policy*);
- Pelaporan Transaksi Keuangan yg Tidak Wajar oleh PPATK.

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, *Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt*)

INDIKATOR PENUNJANG WBK (40%)

- Promosi Jabatan Secara Terbuka;
- Rekruitment Secara Terbuka;
- Mekanisme Pengaduan Masyarakat
- E-procurement;
- Pengukuran Kinerja Individu;
- Keterbukaan Informasi Publik.

PEMBINAAN & PENGAWASAN WBK

- **Terhadap Unit Kerja** (untuk mempersempit kesempatan)
 - perbaikan sistem & prosedur;
 - perbaikan sarana;
 - penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb.
- **Terhadap Pegawai** (untuk meluruskan niat)
 - pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yg efektif.

- **Pemantau independen** (ditunjuk oleh Panitia Seleksi – KemenPAN dan RB)
- **Masyarakat.**





Tunas Integritas



PENGERTIAN INTEGRITAS PNS

“Integritas PNS” Diartikan Sebagai Pernyataan Atau Janji Kepada Diri Sendiri Sebagai Aparatur Pemerintah Tentang Komitmen Melaksanakan Seluruh Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang Dan Peran Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Dan Kesanggupan Untuk Tidak Melakukan Korupsi.

Selesai Dengan Dirinya

Negeri ini membutuhkan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, ia tidak identik dengan orang kaya, karena tidak sedikit orang kaya pun terus mencari tambahan kekayaan, bahkan menambahnya lewat korupsi.



Berorientasi pengabdian
kompeten
bahagia

* PERJUANGANKU LEGIH MUDAH
KARENA MENGUSIR PENJAJAH,
PERJUANGANMU AKAN LEBIH SULIT
KARENA MELAWAN BANGSAMU SENDIRI.

Bacharuddin Jusuf Habibie

MENINGGAL HARI PAHALAH
19 DESEMBER 2018



